



PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIAT DAERAH



RENCANA STRATEGIS 2025 -2029

#takalarcepat



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Takalar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran dari strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renstra :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan dan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- cc. Kecamatan Pattallassang;
- dd. Kecamatan Polongbengkeng Selatan;
- ee. Kecamatan Polongbengkeng Utara;
- ff. Kecamatan Mangarabombang;
- gg. Kecamatan Mappakasunggu;
- hh. Kecamatan Sanrobone;
- ii. Kecamatan Galesong Selatan;
- jj. Kecamatan Galesong;
- kk. Kecamatan Galesong Utara;
- ll. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- mm. Kecamatan Laikang; dan
- nn. Kecamatan Polongbengkeng Timur.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR *24*



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah	8
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	8
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
c. Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Daerah	26
d. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah	42
e. Mitra Sekretariat Daerah	48
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah	50
a. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	50
b. Isu Strategis	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	54
3.2 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	71
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif	93
4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional	146
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	147
4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah	149
BAB V PENUTUP	150

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dapat disusun. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Takalar.

Rencana Strategis disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan guna menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuha dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah

Demikian Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar.

Takalar, 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. MUHAMMAD HASBI,S.STP.,M.AP.M.I.Kom

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19810112 200012 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	19
Tabel II.2	Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	20
Tabel II-3	Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Berdasarkan Pangkat/Golongan	20
Tabel II-4	Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel II-5	Jumlah Aset/Modal Sekretariat Daerah Tahun 2024	22
Tabel II-6	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	28
Tabel II-7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Takalar	33
Tabel II-8	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	35
Tabel II-9	Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	37
Tabel II-10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024	40
Tabel III-1	Keselarasan Tujuan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029 Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029	55
Tabel III-2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2030	56
Tabel III-3	Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 – 2030	58
Tabel III-4	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029	60
Tabel III-5	Strategi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 – 2030	67
Tabel IV-1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2029 – 2030 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	72
Tabel IV-2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 – 2030	96

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Tabel IV-3	Keselaran Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	146
Tabel IV-4	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	148
Tabel IV-5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021).....	18
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah berperan aktif dalam menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas presiden.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah. Proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2023-2026), termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Refleksi atas capaian masa lalu menjadi bekal penting agar Renstra 2025-2029 lebih responsif terhadap tantangan dan peluang strategis di masa depan.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2030;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2024 dan pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas dan fungsi perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*)

pembangunan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi perangkat daerah di dalam penetapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, sesuai dengan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030. Adapun Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Melalui Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah yang dikomandoi oleh peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam Renstra ini harus berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan akuntabel. Dengan latar belakang tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi landasan kokoh bagi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program prioritas, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Takalar dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Pada akhirnya, kinerja pelayanan publik yang baik akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Takalar ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 2)
23. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah “Kabupaten Takalar” Tahun 2021 Nomor 30);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025– 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Bab II Gambaran Pelayanan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar yang Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar; sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah kabupaten Takalar, kinerja pelayanan sampai saat ini, Kelompok sasaran layanan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah, Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis.

- Bab III** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Memuat Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah 2025-2029.
- Bab IV** Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan, Berisi Rumusan Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- Bab V** Penutup, Berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah dilengkapi dengan tugas dan fungsi jabatan struktural sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Di pimpin oleh seorang yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan membawahi bagian-bagian berikut ini:

2.1. Bagian Pemerintahan

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pemerintahan, meliputi administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dan dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3. Bagian Hukum

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Hukum melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan daerah, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi bagian-bagian berikut ini:

3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan

- Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.3 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi ASN lingkup pemerintah daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi bagian-bagian berikut ini:

4.1 Bagian Organisasi

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4.2 Bagian Umum

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait urusan umum; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan fungsi:

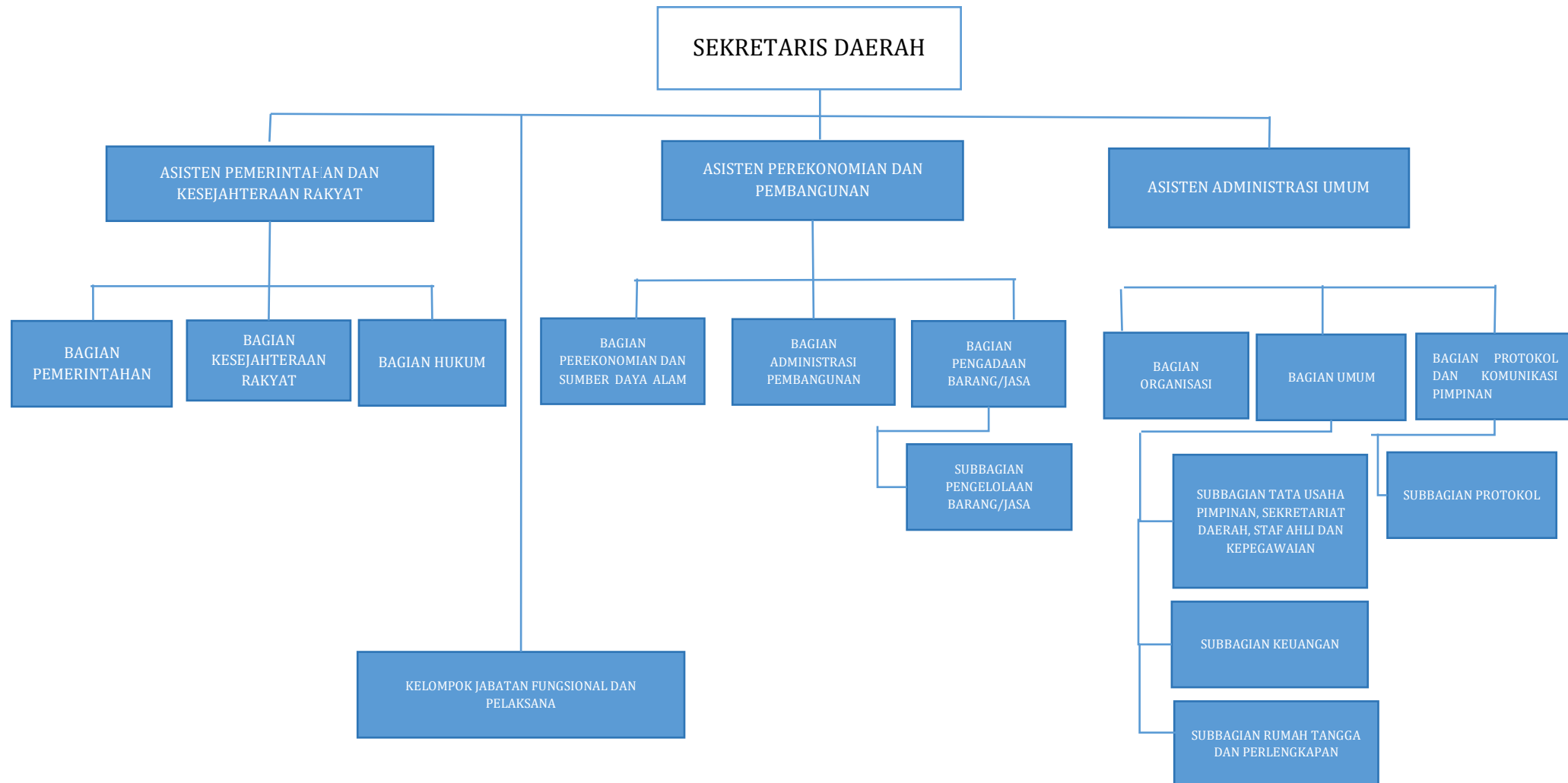
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai Permendagri tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar termasuk klasifikasi tipe B yang terdiri dari 3 (tiga) asisten dan 9 (sembilan) bagian. Dalam permendagri tersebut diatur juga tentang perubahan nomenklatur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Gambar II-1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
(Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021)



b. Sumber Daya Sekretariat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya SKPD terutama Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Jumlah ASN Sekretariat Daerah sebanyak 99 orang yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 56 orang sedangkan perempuan berjumlah 43 orang.

Sekretariat Daerah jika ditinjau dari tingkat pendidikan sangat baik, dimana lebih dari 76% pegawainya telah berpendidikan strata satu (S1) dan strata 2 (S2), komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II-1
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	11	7	18
4	DIPLOMA-III	0	0	0
5	DIPLOMA-IV	0	0	0
6	STRATA-1	33	26	59
7	STRATA-2	12	9	21
8	STRATA-3	0	1	1
JUMLAH		56	43	99

Sumber : Subag. Kepegawaian Setda (data diolah), 2024

Tabel di atas memberikan informasi bahwa diantara 99 pegawai yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar paling banyak pada level strata satu yaitu 59 orang, disusul dengan jumlah pegawai berpendidikan strata dua, yaitu 21 orang, SLTA sebanyak 18 orang, Diploma IV dan Diploma III dan SMP sudah tidak ada. Keadaan ini mengindikasikan bahwa SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar ditinjau dari segi tingkat pendidikan sangat baik, dimana lebih dari 81% pegawainya telah berpendidikan sarjana.

**Tabel II-2
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	ESELON II	7	0	7
2	ESELON III	8	1	9
3	ESELON IV	4	1	5
4	PELAKSANA	49	29	78
JUMLAH		68	31	99

Sumber : Subag. Kepegawaian Setda (data diolah), 2024

Bila dilihat tabel di atas Jabatan Eselon II berjumlah 7 orang, Eselon III berjumlah 9 orang, di Sekretariat Daerah terdapat 9 Bagian, Eselon IV berjumlah 5, sedangkan jabatan sebagai Pelaksana/staf dan fungsional termasuk sangat banyak yaitu 78 orang. Sedangkan komposisi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II-3
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Berdasarkan
Pangkat/Golongan**

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN/GOL.	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Pengatur Muda II/a	0	0	0
2	Pengatur Muda Tk I II/b	3	0	3
3	Pengatur II/c	4	2	6
4	Pengatur Tk.I II/d	4	2	6
5	Penata Muda III/a	9	9	18
6	Penata Muda Tk.I III/b	6	9	15
7	Penata III/c	11	8	19
8	Penata Tk.I III/d	9	9	18
9	Pembina IV/a	4	2	6
10	Pembina Tk.I IV/b	5	1	6
11	Pembina Utama Muda IV/c	2	0	2
12	Pembina Utama Madya IV/d	0	0	0
JUMLAH		57	42	99

Sumber : Subag. Kepegawaian Setda (data diolah), 2024

Dilihat dari segi pangkat/golongan pegawai yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, paling banyak berpangkat Penata, III/c. dikarenakan ASN pada Sekretariat Daerah yang berpendidikan Strata 1 pada saat pengangkatan dan sebahagian mengikuti ujian Dinas untuk naik ke Golongan III.

Tabel II-4
Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Strata Satu (S1)	2	28	30
2	Diploma 3 (D3)	0	0	0
3	SLTA	69	31	100
4	SLTP	0	0	0
JUMLAH		71	59	130

Sumber : Subag. Kepegawaian Setda (data diolah), 2024

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar juga membutuhkan dukungan tenaga non ASN sebanyak 130 Orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah SLTA yang mencapai 100 Orang atau 76,92%, disusul Strata Satu (S1) sebanyak 30 Orang atau 23,08%, SLTP dan , Diploma 3 (D3) sebanyak 0 Orang. Keberadaan tenaga Non ASN sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama yang memerlukan jasa pelayanan publik.

Dari beberapa tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ASN saat ini tidak mencukupi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Hal ini dapat dilihat dari masih ada jabatan penata keuangan yang juga masih kosong dan belum diisi hal ini tentunya sangat mendesak untuk dilakukan perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan mengakomodir kebutuhan tenaga ASN. Dengan demikian tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan tersebut dilaksanakan oleh pegawai yang ada.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa terdapat beberapa jabatan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tetapi jabatan

tersebut tidak terdapat dalam struktur organisasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Jabatan-jabatan pelaksana dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analis Perencana
2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
3. Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran

Kekurangan tersebut tentu sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mengingat jabatan-jabatan pelaksana tersebut sangat penting dalam menunjang kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas langsung yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting.

Sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas, tetapi merupakan elemen strategis yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan suatu komunitas atau organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas bagi individu, organisasi, maupun pemerintah.

Untuk menunjang Sarana dan Prasarana Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, maka diperlukan fasilitas yang cukup memadai, agar setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah:

**Tabel II-5
Jumlah Aset/Modal Sekretariat Daerah Tahun 2024**

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. TANAH				
1	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	Bidang	3	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	22	Baik
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bidang	4	Baik

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4	Tanah Bangunan Pasar	Bidang	1	Baik
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Bidang	2	Baik
6	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	Bidang	1	Baik
7	Tanah Bangunan Poliklinik	Bidang	5	Baik
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bidang	36	Baik
9	Tanah Bangunan Wisata/Rekreasi	Bidang	1	Baik
10	Tanah Kaveling Tanah Matang	Bidang	3	Baik
11	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Bidang	3	Baik
12	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	Bidang	3	Baik
13	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Bidang	7	Baik
14	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	Bidang	2	Baik
2. PERALATAN DAN MESIN				
1	Kendaraan Dinas	Unit	109	Baik
2	Alat Pendingin Ruangan (A.C)	Unit	113	Baik
3	Camera, CCTV, Drone dan Handy Cam	Unit	17	Baik
4	Meja dan Kursi Kerja / Rapat	Unit	1609	Baik
5	Laptop	Unit	36	Baik
6	P.C Unit dan Monitor	Unit	46	Baik
7	Pinter, Scanner dan Speaker Komputer	Unit	52	Baik
8	Televisi	Unit	46	Baik
9	Telephone Mobile	Unit	9	Baik
10	Handy Talky	Unit	9	Baik
11	Lemari Es dan Reach In Frezzer	Unit	18	Baik

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

12	Lemari Besi, Kaca dan Kayu	Unit	77	Baik
13	Filling Kabinet	Unit	17	Baik
14	Tempat Tidur Kayu	Unit	49	Baik
15	Kasur/Spring Bed	Unit	55	Baik
16	Alat Pemanas dan Water Filter	Unit	3	Baik
17	Power Amplifier, Audio Amplifier, Sound System dan Wireless	Unit	17	Baik
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector, LCD Projector/Infocus dan Tripod	Unit	15	Baik
19	Mesin Cuci dan Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	Unit	6	Baik
20	Peralatan Fitnes	Unit	1	Baik
21	Dispenser	Unit	13	Baik
22	Microwave, Rice Cooker (Alat Dapur), Oven Listrik	Unit	8	Baik
23	Server	Unit	1	Baik
24	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	1	Baik
25	Portable Generating Set	Unit	3	Baik
26	Kipas Angin	Unit	19	Baik
27	Antene MF/MW Portable	Unit	1	Baik
28	Pompa Air	Unit	3	Baik
3. BANGUNAN				
1	Asrama Permanen	Bidang	4	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bidang	10	Baik
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Bidang	3	Baik
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Bidang	3	Baik
5	Gedung Pos Jaga Permanen	Bidang	2	Baik

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

6	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	Bidang	2	Baik
7	Pagar	Bidang	6	Baik
8	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Bidang	4	Baik
9	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Bidang	3	Baik
10	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Bidang	15	Baik
11	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Bidang	4	Baik
12	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Bidang	2	Baik
13	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Bidang	4	Baik
14	Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat	Bidang	1	Baik
15	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Bidang	1	Baik
16	Taman Kantor	Bidang	1	Baik
17	Tempat Parkir	Bidang	2	Baik
18	Tugu Pembangunan	Bidang	1	Baik
19	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Bidang	1	Baik
20	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	Bidang	1	Baik
21	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kota Administratif	Bidang	1	Baik
4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Jalan Kabupaten Lokal	Bidang	1	Baik
2	Paving Blok Jalan	Bidang	5	Baik
3	Saluran Drainage	Bidang	1	Baik

Sumber : Laporan Pengurus Barang Setda (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hampir semua aset yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam kondisi baik, yakni berupa tanah, peralatan, jalan dan bangunan, namun jumlah aset semakin berkurang dari tahun sebelumnya yang disebabkan beberapa hal diantaranya adanya penghapusan aset yang dianggap tidak mempunyai nilai lagi serta penyerahan beberapa aset

ke SKPD lainnya misal aset lampu jalan yang diserahkan ke Dinas Perhubungan, aset tanah berupa tanah pasar diserahkan ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, aset bangunan berupa Bangunan Balla Lompoa diserahkan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta aset kendaraan dinas yang diserahkan ke beberapa SKPD.

Di samping itu aset yang dimiliki Sekretariat Daerah masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan staf baik kuantitas maupun kualitas, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sesuai kebutuhan organisasi demi untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan aset secara rutin dan berkala.

c. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2025-2029 menurut indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya. Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas, dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Selain tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana disebutkan di atas Sekretariat Daerah mempunyai 3 (tiga) peran utama, yaitu: (1) Pelayanan sebagai pengambil kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

- (2) Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun gambaran kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II.6 berikut ini:

**Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2022**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketepatan waktu penyampaian LKPj	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai evaluasi LPPD	195	205	2,15	0	307	3,07	0	0	143%
3	Persentase Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Tertata	50%	55%	75%	55%	50%	96%	55%	55%	128%
4	Jumlah Inovasi Daerah	8	9	10	8	8	3	100%	89%	30%
5	Persentase Penyelesaian Produk Hukum	80%	90%	100%	90%	85%	95%	90%	90%	95%
6	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis Perangkat Daerah yang terfasilitasi	88%	90%	95%	90%	80%	95%	90%	90%	100%
7	Persentase bantuan penyelesaian sengketa hukum di Lembaga Peradilan	80%	90%	100%	90%	85%	100%	90%	90%	100%

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

8	Persentase register produk hukum daerah	95%	98%	100%	90%	100%	100%	90%	90%	100%
9	Jumlah Perda yang dibatalkan oleh Kemendagri	0	0	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!
10	Persentase Tempat Ibadah yang memiliki Imam/Pendeta Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Masjid yang memiliki TK/TPA aktif	90%	95%	100%	95%	85%	95%	95%	95%	95%
12	Persentase Pemberian Insentif Pembina TK/TPA yang Tepat Sasaran	90%	95%	100%	95%	95%	90%	95%	95%	90%
13	Persentase pemberian insentif Pegawai Syara' yang tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%
14	Persentase MoU yang aktif	90%	95%	100%	95%	90%	100%	95%	95%	100%
15	Tingkat Inflasi Daerah	3,0%	3,0%	3,0%	3%	3,07%	5,81%	3%	3%	194%
16	Nilai Hasil Investasi Pemerintah Kabupaten	68	68	70	50	65	70%	74%	96%	1%
17	Persentase dukungan Layanan pemilihan penyedia barang/jasa	100%	100%	100%	56,48%	90%	100%	90%	90%	100%

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

18	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RUP	100%	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
19	Persentase sengketa pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	10,00%	100%	100%	90%	90%	100%
20	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah	60,00%	80,00%	100,00%	89,70%	70,40%	98%	70,40%	70,40%	98%
21	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	74,82%	100%	74,82%	74,82%	100%
22	Persentase Pengadaan secara elektronik (<i>e-procurement</i>)	100%	100%	100%	30%	90%	100%	90%	90%	100%
23	Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan	90%	95%	100%	80%	80%	85%	90%	90%	85%
24	Persentase Penerapan Hasil Analisis Beban Kerja	90%	95%	100%	100%	80%	85%	90%	90%	85%
25	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SOP Pelayanan	80%	90%	100%	55%	80%	85%	90%	90%	85%
26	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Komponen Pelaporan Kinerja	BB	BB	A	CC	CC	CC	73%	58%	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

27	Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan	100,00	100,00	100,00	97.67	95	96%	97.67	97.67	1%
28	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Tamu Luar Daerah	100,00	100,00	100,00	79.17	95	96%	79.17	79.17	1%
29	Persentase media massa milik Pemerintah kabupaten yang aktif	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	90%	100%	98%	100%	100%	98%
31	Persentase Pengaduan Pengelolaan Informasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	85%	85%	98%	100%	100%	98%
32	Persentase Penyiapan Materi Rapat, Materi Persidangan, dan Materi Kebijakan	100%	100%	100%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
33	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A	CC	CC	B	73%	58%	
34	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	90,80%	90,80%	90,80%	95,00%	90,80%	92,49%	105%	100%	102%

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

36	Persentase Pegawai memperoleh nilai SKP "Baik"	95%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	95%
37	Persentase Pelaporan Tepat Waktu (Lap. Keu, Lap. Kinerja dan SPJ)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel II-7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	B (71-72)	B (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	CC (52,33)	B (69,23)	91%	92%
2	Nilai SAKIP Daerah	B (<60-70)	B (<60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	B (63,37)	B (64,05)	91%	92%
3	Nilai Evaluasi LPPD	3,20	3,30	3,40	3,50	2,43	1,62	76%	49%
4	Indeks Inovasi Daerah	40	45	50	55	56,53	57,02	141%	126%
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK (70-90)	BAIK (70-90)	BAIK (70-90)	BAIK (70-90)	KURANG (24,40)	CUKUP (50,01)	27,11	55,56
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	60-70	70-80	80-90	90-100	93,78	82,39	133%%	103%
7	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	B (71-72)	B (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (70,58)	BB (70,60)	100%	100%
8	Nilai SAKIP Setda	B (<60-70)	B (<60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (70,58)	BB (70,60)	100%	100%

Sumber Data : LKj Sekretariat Daerah

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah kabupaten Takalar masing-masing indikator pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target yaitu B sedangkan targetnya adalah BB. Hal ini disebabkan Indeks RB memiliki metode baru yaitu dengan penginputan Rencana Aksi RB dan RB Tematik, kurangnya SDM dan anggaran pada bagian Organisasi.
2. Nilai Evaluasi SAKIP Daerah, realisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni nilai BB diakhir periode, karena selama 4 (empat) tahun berjalan nilainya hanya B, penyebabnya adalah kualitas penyusunan laporan kinerja OPD masih rendah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius bagi OPD untuk menyiapkan laporan yang berkualitas.
3. Nilai evaluasi LPPD, realisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena realisasinya masih di bawah target, hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, lemahnya dokumentasi/pengarsipan capaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah, kapasitas SDM yang terbatas, keterlambatan pengumpulan data dan belum optimalnya sinkronisasi sistem data antar unit kerja atau OPD yang berbeda menyebabkan inkonsistensi dan kesulitan dalam validasi data kinerja.
4. Jumlah Inovasi Daerah, realisasinya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya inovator-inovator mampu mengaktualisasikan karyanya untuk diikuti dalam kompetisi, baik tingkat regional maupun tingkat Nasional.
5. Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa realisasinya masih dibawah target karena partisipasi organisasi perangkat daerah yang masih kurang dan dukungan anggaran yang kurang memadai.
6. Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal target untuk tahun 2023 dan 2024 capaiannya telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.
7. Indikator Nilai SAKIP Setda capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu BB. Hasil evaluasi keseluruhan dituangkan dalam bentuk nilai dengan jisaran 0s/d100. sekretariat Daerah Kabupaten Takalar memperoleh nilai SAKIP sebesar 71 dengan kategori predikat BB, interpretasi Sangat Baik.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program, terutama dalam konteks pemerintahan. IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK tidak hanya sekedar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Adapun target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah digambarkan pada tabel II-8 berikut :

**Tabel II-8
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					CAPAIAN					KET.
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Jumlah Total Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditanda Tangani pada Kuartal Pertama	Persen	0	0	0	0	0	1,21	1,82	2,32	1,88	0	
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	100	100	100	100	100	6,27	8,85	13,53	4,66	18,6	
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	Persen	100	100	100	100	100	83,1	73,58	66,02	36,88	40,94	

Berdasarkan Tabel II-8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan Target dan Realisasi Capaian IKK Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sebagai cerminan prioritas strategis dan sasaran dari Organisasi Pemerintah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa Ke Tahun berikutnya yang ditanda Tangan pada Kuartal Pertama Tahun 2020 – 2024 target 0, realisasi capaian mengalami fluktuasi dari target 2020-2023 namun di tahun 2024 sudah menunjukkan pencapaian target 0 disebabkan karena proyeksi pelaksanaan kegiatan dari sektor pengadaan barang/jasa disetiap tahun berjalan dengan optimal sehingga sudah tidak ada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibawa ketahun berikutnya.
2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif Tahun 2020 - 2024 dengan target 100 dimana pada tahun 2024 total Belanja Tender dan E-Purchasing sebesar Rp. 179.280.206.275, Jika dibandingkan dengan total belanja operasi dan belanja modal pada tahun berkenaan yang sebesar Rp. 1.030.516.785.890,9 maka Presentase jumlah pengadaan yang dilakukan terhadap belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2024 adalah 18,6 persen.
3. Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui belanja pengadaan pada tahun 2020 - 2024 dengan target masing-masing 100 dimana pada tahun terakhir 2024 adalah mengalami penurunan capaian menjadi 40,94 dibandingkan capaian tahun 2020 dengan capaian sebesar 83,1.

2.2.2 Target Capaian SDGs Sekretariat Daerah

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Takalar telah berkontribusi menyelesaikan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kontribusi tersebut khususnya pada tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan indikator Tingkat Inklusi Keuangan, Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa, Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa. Dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) dapat dilihat pada Tabel II-5 berikut :

**Tabel II-9
Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar**

NO	KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN					REALISASI PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES Keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan														
16.6.MENGEMBANGKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT														
1	16.6.1.(b)	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Nilai	N/A	N/A	N/A	B (>60-70)	B (>60-70)	59.38	61.14	61.45	63.37	64.05	SEKRETARIAT DAERAH
2	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	100	100	100	100	100	90%	90%	30%	90%		SEKRETARIAT DAERAH
3	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persen	100	100	100	100	100		70,91	56,75	70,21	82,85	SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Tabel II-10 Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) mengalami peningkatan capaian dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dimana hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dari dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan juga SAKIP dari Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah kabupaten Takalar.
2. Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan sampai tahun 2023 realisasi sudah mencapai 90% sedangkan ditahun 2024 yang dimaksud tidak terdapat data.
3. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) pada table diatas menunjukkan bahwa Indikator SDGs sampai tahun 2024 sudah mencapai 82,85 dengan predikat Zona Hijau..

2. Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045, juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II-10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	An ggar an	Realis asi
2				3	4				7	8				11	12	15	16
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.348.901.319	34.692.508.313	31.282.181.634	30.478.993.952	29.761.154.891	33.827.270.547	32.758.547.508	37.103.718.502	27.561.955.197	27.976.654.897	95,70	94,43	95,43	90,43	94,00	-0,04	-0,04
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.517.889.500,00	8.815.563.087,00	7.750.000.000,00	8.373.500.100	11.868.581.700	4.600.026.826	6.776.982.345	6.326.278.042	7.637.883.351	10.858.924.388	65,96	81,05	82,05	91,21	91,49	0,24	0,26
Program Perekonomian dan Pembangunan	2.690.076.000,00	1.514.518.730,00	1.849.999.840,00	1.089.498.800	1.170.804.700	2.180.760.454	1.282.773.816	1.959.480.837	1.079.437.660	1.114.967.705	65,88	82,29	83,29	99,08	95,23	-0,14	-0,08

Sumber data : Lap. Money dan Lap. Keu Setda

Untuk mengetahui gambaran anggaran belanja dan realisasi anggarannya per program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran belanja dari tahun awal perencanaan yakni tahun 2021 sebesar Rp.34,69 milyar dengan realisasi sebesar 32,76 milyar atau 94,45persen, tahun 2022 sebesar Rp.30,29 milyar dengan realisasi sebesar Rp.28,81 milyar atau 95,14 persen tahun 2023 sebesar Rp.30,47 milyar dengan realisasi sebesar Rp.27,56 atau 90,43 persen, tahun 2024 anggarannya sebesar Rp.29,76 milyar dengan realisasi sebesar Rp.27,97 milyar atau 94 persen, tahun 2025 anggarannya sebesar Rp. 30,32 milyar dan realisasinya belum dapat dilaporkan karena masih dalam tahap pelaksanaan tahun berjalan demikian pula untuk tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 22,43 milyar.
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat anggaran belanja dari tahun awal perencanaan yakni tahun 2023 sebesar Rp.8,37 milyar dengan realisasi sebesar Rp.7,63 atau 91,21 persen, tahun 2024 anggarannya sebesar Rp.11,86 milyar dengan realisasi sebesar Rp.10,85 atau 91,49 persen, tahun 2025 anggarannya sebesar Rp. 5,04 milyar dan realisasinya belum dapat dilaporkan karena masih dalam tahap pelaksanaan tahun berjalan demikian pula untuk tahun 2026 anggarannya sebesar Rp.5,9 milyar.
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan anggaran belanja dari tahun awal perencanaan yakni tahun 2023 sebesar Rp.1,08 milyar dengan realisasi sebesar Rp.1,07 atau 99,08 persen, tahun 2024 anggarannya sebesar Rp.1,17 milyar dengan realisasi sebesar Rp.1,11 milyar atau 95,23 persen, tahun 2025 anggarannya sebesar Rp. 301 Juta dan realisasinya belum dapat dilaporkan karena masih dalam tahap pelaksanaan tahun berjalan demikian pula untuk tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 990 juta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar adalah

1. Adanya perubahan kebijakan dan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kegiatan.
2. Adanya perubahan kebijakan atau *refocusing* yang menyebabkan hanya kegiatan yang dianggap prioritas yang terlaksana.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang

dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah dalam fungsi mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah tentunya akan mengarah pada sampai di mana sasaran layanan Pemerintahan itu tersentuh, apakah sudah terorientasi pada tujuan utama pemerintahan dan sudah dikategori Pemerintahan yang ‘Melayani”

Kelompok Sasaran Layanan yang diemban oleh Sekretariat Daerah dijelaskan berdasarkan Jenis Layanan utama Perangkat Daerah tersebut dan Kelompok Sasaran Layanan apa yang dititik beratkan sebagaimana mestinya, berikut adalah penjelasan Kelompok Sasaran Layanan berdasarkan Jenis Layanan yang diampu oleh Sekretariat Daerah:

1. Layanan Persuratan Pimpinan

Kelompok sasaran layanan persuratan Pimpinan Daerah adalah individu atau kelompok yang menjadi penerima surat-surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah. Mereka bisa termasuk masyarakat umum, instansi Pemerintah lain(Instansi Intern Kabupaten, Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat/Kementrian, atau pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan keputusan atau informasi yang disampaikan dalam surat tersebut.

Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan meliputi :

- **Masyarakat umum:**

Mereka yang menerima surat izin, surat keputusan, atau informasi penting lainnya dari pemerintah daerah.

- **Instansi Pemerintah lainnya:**

Misalnya, surat dinas antar dinas atau surat instruksi dari Pimpinan daerah kepada kepala dinas.

- **Pihak terkait lainnya:**

Seperti pengusaha, organisasi masyarakat, atau pihak yang memiliki hubungan kerja atau kepentingan dengan pemerintah daerah.

Pengelompokan sasaran layanan persuratan ini penting karena membantu memastikan bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah terdistribusi dengan tepat dan efektif, sehingga informasi atau kebijakan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pihak yang tepat.

2. Layanan Kegiatan/Keprotokolan Pimpinan

Kelompok sasaran layanan keprotokolan pimpinan daerah adalah pimpinan pemerintah daerah (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi). Layanan keprotokolan ini mencakup penyambutan tamu pimpinan, koordinasi dan fasilitasi kunjungan, serta pelaksanaan acara resmi yang dihadiri oleh pimpinan.

Kelompok Sasaran Layanan Keprotokolan dijelaskan sebagai berikut:

- **Pimpinan Pemerintah Daerah:**

Layanan keprotokolan difokuskan pada kebutuhan pimpinan daerah, seperti penyambutan tamu, pengaturan acara resmi, dan memastikan kelancaran kunjungan mereka.

- **Acara Resmi:**

Keprotokolan juga berlaku untuk acara resmi yang dihadiri oleh pimpinan daerah, termasuk upacara pelantikan, serah terima jabatan, dan kunjungan kerja.

- **Pelaksanaan:**

Layanan keprotokolan dilaksanakan oleh bagian protokol yang ada di Pemerintahan Daerah, seperti Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- **Tujuan:**

Tujuan utama layanan keprotokolan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan daerah dalam menjalankan tugasnya dan menjaga citra positif pemerintah daerah.

3. Layanan Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian Inflasi Daerah bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang dan Jasa, melindungi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kelompok sasaran layanan pengendalian inflasi daerah adalah masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta pelaku usaha

Sekretariat Daerah dalam mengemban tugas ini berkolaborasi dengan beberapa OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Forkopimda Kabupaten melakukan fasilitasi dalam bentuk kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tujuan terjaminnya

kestabilan harga di pasar sehingga masyarakat merasa terlindungi oleh Pemerintahan yang berjalan.

4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada dasarnya terbagi menjadi 2(dua) Layanan yaitu Layanan Pengelolaan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara elektronik;

Kelompok Sasaran Layanan Pengelolaan Pengadaan adalah seluruh OPD Kabupaten, di mana yang dilayani adalah Difasilitasi untuk Personil Pengelola Pengadaannya seperti: Pejabat Pengadaan/Pelaku Pengadaan.

Kelompok Sasaran Layanan Pengadaan secara Elektronik adalah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten, hal ini terkait Akun Penggunaan Anggaranannya(PA), Kuasa Pengguna Anggaranannya(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), serta Pejabat Pengadaannya; selain itu Kelompok sasaran layanan LPSE pada tahap Verifikasi Penyedia Jasa/Perusahaan

5. Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) memiliki tugas yang luas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan otonomi daerah. Mereka membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, dan memantau kinerja perangkat daerah.

Secara lebih detail, layanan yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan dan penjelasan kelompok sasaran layanannya meliputi:

a. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah

Melakukan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan daerah, serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan tersebut untuk seluruh perangkat Daerah di Kabupaten.

b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Mengkoordinasikan penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di seluruh wilayah Pemerintahan di Kabupaten

c. Pembinaan Administrasi Pemerintahan

Memberikan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten

d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Memastikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayah Pemerintahan Kabupaten berjalan efektif dan efisien.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya di bidang administrasi pemerintahan.

f. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

Melakukan fasilitasi dan koordinasi terkait proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakilnya, termasuk izin dan cuti.

g. Laporan dan Data

Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan menghimpun informasi laporan pemerintah daerah (ILPPD) yang bersumber dari Instansi Pemerintahan di Daerah tersebut

h. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Melaksanakan fasilitasi penyusunan SPM Perangkat Daerah.

i. Koordinasi dan Sosialisasi

Mengkoordinasikan berbagai kegiatan, termasuk peringatan Hari Jadi Provinsi dan Hari Otonomi Daerah, serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan daerah.

j. Pembinaan Distrik dan Kelurahan

Melakukan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat distrik dan kelurahan.

k. Pembinaan Aparatur Pemerintahan

Mengembangkan aparatur pemerintahan yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Bagian Tata Pemerintahan berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Layanan Administrasi dan Pembinaan Aparatur Instansi Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) memiliki beberapa layanan penting, meliputi penyiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di berbagai bidang kelembagaan, tata laksana, dan kinerja. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan data dan informasi, termasuk Standar Operasional Prosedur, survei kepuasan masyarakat, peta proses bisnis, dan inovasi pelayanan publik.

Dari Penjelasan di atas maka pada prinsipnya Bagian Organisasi SETDA mengarah pada 2(dua) kelompok sasaran Layanan sbb:

1. Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Kelompok sasaran layanan pelayanan publik dan Survey

Kepuasan Masyarakat adalah semua orang atau kelompok yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah atau lembaga publik lainnya. Secara umum, kelompok sasaran ini mencakup seluruh warga negara yang ada di Kabupaten, baik yang memanfaatkan layanan rutin seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maupun kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus

2. Pelayanan Kelembagaan, tata laksana dan Kinerja

Jenis layanan ini menitikberatkan pada kelompok sasaran layanan untuk seluruh Perangkat daerah di Kabupaten sehingga tujuan perumusan kebijakan sampai pada Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir

7. Layanan Kesejahteraan Rakyat

Dalam mengemban tugas Layanan Kesejahteraan rakyat di Kabupaten Takalar, Kelompok Sasaran Layanan ini adalah Masyarakat Kabupaten pada Umumnya, di mana Pemerintah hadir dalam merumuskan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, pengembangan dan pembinaan bidang Pendidikan, olahraga, Pemuda, Pengendalian Penduduk, Perlindungan anak, Kesehatan Sosial, Tenaga kerja, Transmigrasi serta keagamaan.

Sekretariat Daerah dalam mengemban Tugas Pemerintahan tersebut melakukan Kolaborasi, Kerja sama serta pendampingan dengan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan yang tentunya dengan tujuan yang sama untuk kesejahteraan Rakyat secara utuh.

8. Layanan Perumusan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bagian Hukum Setda (Sekretariat Daerah) memiliki berbagai layanan yang berkaitan dengan aspek hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Layanan tersebut meliputi penyiapan dan perumusan kebijakan hukum, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hukum, pemberian bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.

Berikut beberapa layanan yang lebih detail yang diemban Bagian Hukum Setda yang berhubungan dengan kelompok sasaran layanan:

- **Penyusunan Produk Hukum Daerah:**

Bagian Hukum berperan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, serta berbagai produk hukum daerah lainnya. kelompok sasaran layanan adalah Masyarakat Kabupaten secara umum

- **Telaahan dan Evaluasi Produk Hukum:**

Bagian Hukum menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda dan produk hukum daerah lainnya. Kelompok sasaran layanan adalah OPD Pengampu/asal Produk hukum disusun

- **Bantuan Hukum:**

Bagian Hukum memberikan bantuan hukum kepada seluruh unsur pemerintahan daerah yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas. Unsur Pemerintahan sebagai Sasaran Layanan.

- **Dokumentasi dan Informasi Hukum:**

Bagian Hukum berperan dalam mendokumentasikan dan menyediakan informasi terkait produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang dapat diakses menjadi konsumsi hukum bagi masyarakat luas, di manamasyarakat adalah Kelompok sasaran Layanan

- **Penyuluhan Hukum:**

Bagian Hukum melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai sasaran Layanan hukum, termasuk penyuluhan terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

- **Pengendalian dan Monitoring:**

Bagian Hukum melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap program-program di bidang hukum.

- **Penanganan Sengketa Hukum:**

Bagian Hukum dapat membantu dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah, termasuk penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Kelompok sasaran layanan ini adalah Pemerintah Kabupaten secara utuh

- **Pengkajian Produk Hukum:**

Bagian Hukum mengkaji produk hukum, seperti perjanjian kerjasama (MOU), untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- **Fasilitasi HAM:**

Bagian Hukum juga berperan dalam fasilitasi masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan masyarakat.

- **Publikasi Produk Hukum:**

Bagian Hukum melakukan publikasi produk hukum daerah agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai sasaran layanannya

e. **Mitra Perangkat Daerah dalam Memberiak Layanan**

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran sentral dalam memberikan layanan kepada perangkat daerah dan masyarakat. SETDA bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif. Mitra SETDA dalam memberikan layanan ini meliputi berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya.

Mitra SETDA dalam memberikan layanan:

1. Perangkat Daerah:

SETDA membantu perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan tugas, dan melakukan pemantauan dan evaluasi.

2. Masyarakat:

SETDA memberikan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk penerbitan dokumen, pengelolaan aset, dan layanan publik lainnya.

3. Pihak Ketiga:

SETDA dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti dalam bidang pembangunan, perekonomian dan investasi. Pengendalian Inflasi membutuhkan kerja sama /mitra dengan Pelaku Pasar dalam hal ini Pengusaha, Perusahaan yang bergerak di bidang Penyediaan Kebutuhan barang pokok; sektor lain, dalam Pembinaan Keagamaan Pemerintah Kabupaten melalui SETDA melakukan mitra bersama Managemen Dakwah dan Lembaga Keagamaan yang ada di Kabupaten untuk menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan di kabupaten dalam bentuk Tabligh Akbar, Pengajian Rutin dan semacamnya

4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD):

TKKSD membantu SETDA dalam mengidentifikasi potensi mitra kerja sama, memberikan saran, dan melakukan pengamanan aset.

f. **Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja**

Hubungan kemitraan antara Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten bersifat strategis, melibatkan

kerjasama dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama, seperti pengembangan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah. Setda, sebagai lembaga pemerintahan yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah, berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap kinerja BUMD.

Elaborasi :

1. Pembinaan dan Pengawasan

Setda memiliki peran penting dalam membina and mengawasi BUMD. Ini termasuk memberikan arahan kebijakan, memastikan BUMD menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi kinerja BUMD.

2. Kerjasama Strategis

Setda dan BUMD dapat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti :

- * Pengembangan ekonomi daerah yaitu BUMD dapat berperan dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan di daerah pariwisata, pertanian, atau daerah kreatif. Sekretariat Daerah dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi BUMD.
- * Peningkatan Pelayanan Publik yaitu BUMD dapat terlibat dalam penyediaan pelayanan publik seperti pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, atau transportasi publik. Sekretariat Daerah dapat memastikan BUMD memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
- * Pemanfaatan Aset Daerah yaitu BUMD dapat dimanfaatkan untuk mengelola dan mengembangkan aset daerah, seperti lahan, bangunan atau infrastruktur. Sekretariat Daerah dapat memberikan dukungan dalam hal perizinan, pengelolaan aset dan pembiayaan investasi.

3. Rencana Bisnis dan Anggaran

BUMD dapat menyusun rencana bisnis dan anggaran yang disetujui oleh Sekretariat Daerah. Rencana bisnis ini harus sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan pembangunan daerah.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD secara berkala dan BUMD pun wajib menyampaikan laporan keuangan dan kinerja ke Sekretariat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian tugas dan fungsi yang direncanakan dengan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi perangkat daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Isu strategis perangkat daerah bersifat kompleks, harus melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan dan program sebagai upaya dalam penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan administrasi dan kepegawaian;
3. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik;
4. Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan batas eksisting wilayah, baik antar kelurahan, kecamatan, maupun dengan kabupaten/kota lain, yang berdampak pada ketidakpastian perencanaan pembangunan wilayah;
5. Belum optimalnya kerjasama daerah, baik dalam bentuk kemitraan antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga belum terdapat sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah konflik horizontal dan isu-isu intoleransi;

7. Belum optimalnya perumusan kebijakan di bidang budaya, pendidikan, dan kesehatan, yang memerlukan fasilitasi lintas sektor dan sinergi antar Perangkat Daerah yang lebih terarah;
8. Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan;
9. Belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang masih terkendala oleh ketidakterpaduan data dan minimnya koordinasi antar pihak terkait;
10. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM, baik bagi masyarakat umum maupun ASN dan pihak swasta yang berkaitan dengan iklim investasi;
11. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan hukum pemerintah;
12. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah;
13. Penyusunan program pembangunan dan pengendalian masih belum sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis dan menghadapi kendala penganggaran, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan Pembangunan;
14. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang profesional;
15. Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut;
16. Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana aparatur serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang tidak efisien;

17. Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola administrasi modern;
18. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona integritas, AKIP, dan SAKIP OPD yang masih rendah, serta keterbatasan SDM bagian organisasi dan kinerja;
19. Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah yang menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi publik;
20. Belum optimalnya pengelolaan retribusi dan penyusunan administrasi keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen dan informasi aset.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis perangkat daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan perangkat daerah, adapun isu – isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan sistem pelayanan publik;
2. Kompetensi, etos kerja, profesionalisme sumber daya manusia aparatur sebagai pelayan masyarakat belum optimal.
3. Pembinaan operasional keagamaan belum optimal.

**BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi *“Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”*, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten takalar Tahun 2025 – 2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Penetapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun **Tujuan Renstra** Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**, untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1. : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan
 2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah
 3. Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah
- Keselarasannya antara tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.
Keselarasan Tujuan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029
Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029**

NO.	Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029	Tujuan/ Sasaran Renstra Setda Tahun 2025 - 2029
1.	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan public	S2.3. Meningkatnya Akuntabilitas dan integritas Pemerintahan Daerah	T1, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien
			Sasaran 1,1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan
			S,2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah
			S,3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran sampai pada akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah											
- Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah (Nilai)	69,23	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Nilai Sakip Daerah (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-28,77	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	64,05	65,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	2,87	3,01	3,25	3,51	3,60	3,80	4,00	
			Tingkat Inflasi ((%))	56,00	57,00	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	50,10	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah (%)	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,15	
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah (%)	2,06	2,97	3,02	3,46	3,37	3,77	3,92	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Sekretariat Daerah (Nilai)	71,00	72,00	73,00	75,00	78,00	80,00	81,00	
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat Daerah (%)	85,00	91,00	92,00	94,00	95,00	97,00	100	

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III-3
Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 - 2030**

NO.	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
1.	Penetapan Arah Tata Kelola Pemerintahan dengan Pemanfaatan Sarana/Prasarana berbasis Digital	Peningkatan Kompetensi Aparatur untuk mensukseskan Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	Penajaman Arah Kebijakan Pemerintahan di berbagai sektor layanan untuk Tujuan Peningkatan Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Akselerasi, Monitoring dan Evaluasi Progres Tahapan Pembangunan untuk Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Baik	Pemantapan untuk mewujudkan Peningkatan Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Digital

3.2.1 Arah Kebijakan

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, arah kebijakan Renstra Perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel III-4
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029**

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-an yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran, etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintahan Digital yang terpercaya, berkualitas, transparansi, Inklusif dan Efisien	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S.1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan sistem pelayanan publik, Meningkatkan Kompetensi, etos kerja, profesionalisme sumber daya manusia aparatur sebagai pelayan masyarakat belum optimal, Meningkatkan Operasional pembinaan keagamaan.	
			S.2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor	Meningkatnya pendapatan asli daerah diarahkan pada Ekstensifikasi potensi	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

			Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah	sumber pendapatan asli daerah dan intensifikasi retribusi berbasis digitalisasi	
			S.3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.	

**Tabel III-4
Arah dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029**

OPERASIONAL NSPK	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan sistem pelayanan publik, Meningkatkan Kompetensi, etos kerja, profesionalisme sumber daya manusia aparatur sebagai pelayan masyarakat belum optimal, Meningkatkan Operasional pembinaan keagamaan.	1 Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja
				2 Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel
				3 Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				pemerintah an yang transparan, efisien dan efektif	pemerintah an yang transparan, efisien dan efektif	pemerintah an yang transparan, efisien dan efektif	pemerintah an yang transparan, efisien dan efektif	transparan, efisien dan efektif
				4 Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

		S.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa Dan Lain-Lain PAD yang Sah	Meningkatnya pendapatan asli daerah diarahkan pada Ekstensifikasi potensi sumber pendapatan asli daerah dan intensifikasi retribusi berbasis digitalisasi	1. Mengoptimalkan potensi PAD	1. Mengoptimalkan potensi PAD	1. Mengoptimalkan potensi PAD	1. Mengoptimalkan potensi PAD	1. Mengoptimalkan potensi PAD
				2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD
				3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan	3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan	3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan	3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan	3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan
		S.3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
				2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE	2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE	2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE	2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE	2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE
				3. Diklat Aparatur Sipil	3. Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN)	3. Diklat Aparatur Sipil	3. Diklat Aparatur Sipil	3. Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN)

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

		(ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.	Negara (ASN)		Negara (ASN)	Negara (ASN)	
--	--	---	--------------	--	--------------	--------------	--

3.2.2 Strategi

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi NSPK yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan pula strategi perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra perangkat daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan perangkat daerah tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut.

**Tabel III.5
Strategi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 - 2030**

OPERASIONAL NSPK	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan public	S.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan sistem pelayanan publik, Meningkatkan Kompetensi, etos kerja, profesionalisme sumber daya manusia aparatur sebagai pelayan masyarakat belum optimal, Meningkatkan Operasional pembinaan keagamaan.	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja	1. Reformulasi Kajian analisis Jabatan, Beban Kerja
				2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel	2. Evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel
				3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan yang transparan,	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan yang transparan,	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan yang transparan,	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan yang transparan,	3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan yang transparan,

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				efisien dan efektif	han yang transparan, efisien dan efektif	pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif	pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif	efisien dan efektif
				4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas	4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para penyuluh agama, tokoh agama, dan rohaniwan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

		S.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pe sanggarahan/V illa Dan Lain- Lain PAD yang Sah	Meningkatnya pendapatan asli daerah diarahkan pada Ekstensifikasi potensi sumber pendapatan asli daerah dan intensifikasi retribusi berbasis digitalisasi	1. Mengoptimal kan potensi PAD 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD 3. Pengawasan dan pengendalian di lapangan	1. Mengopti malkan potensi PAD 2. Rehabilita si Sarana dan Prasarana potensi PAD 3. Pengawas an dan pengendal ian di lapangan	1. Mengopt imalkan potensi PAD 2. Rehabilita si Sarana dan Prasara na potensi PAD 3. Pengaw asan dan pengend alian di lapanga n	1. Mengopt imalkan potensi PAD 2. Rehabilit asi Sarana dan Prasaran a potensi PAD 3. Pengawa san dan pengend alian di lapangan	1. Mengoptimal kan potensi PAD 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana potensi PAD 3. Pengawasan dan pengendalia n di lapangan
		S.3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pada Sekretariat Daerah	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu 2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE Diklat Aparatur	1. Penyelesai an Laporan Tepat Waktu 2. Penyediaa n sarana dan prasarana SPBE 3 Diklat Aparatur Sipil	1. Penyeles aian Laporan Tepat Waktu 2. Penyedi aan sarana dan prasaran a SPBE 3 Diklat Aparatu r Sipil	1. Penyeles aian Laporan Tepat Waktu 2. Penyedia an sarana dan prasaran a SPBE 3 Diklat Aparatur Sipil	1. Penyelesaian Laporan Tepat Waktu 2. Penyediaan sarana dan prasarana SPBE 3. Diklat Aparatur

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Sipil Negara (ASN)	Negara (ASN)	Negara (ASN)	Negara (ASN)	Sipil Negara (ASN)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PRNYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sementara program prioritas untuk perencanaan strategis merupakan tanggung jawab perangkat daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub keuangan yang menjadi kewenangan Setda.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output pada renstra perangkat daerah Tahun 2026 - 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030 terdapat 3 (tiga) program, 21 (empat belas) Kegiatan dan 75 (Tujuh puluh enam) Sub kegiatan perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun ke depan.

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2029 – 2030
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)		
4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah									
- Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan			Indeks Reformasi Birokrasi Daerah (Nilai)				
					Nilai Sakip Daerah (Nilai)				
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)				
					Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)				
					Tingkat Inflasi ((%))				
					Return on Asset (ROA) BUMD (%)				
					Terlaksananya Agenda Kegiatan Pimpinan dengan lancar			Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Tamu Tepat Waktu (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

			Daerah Kab.Takalar	Persentase Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Nilai Aset Pemerintah Bertambah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Terlaksananya Agenda Kegiatan Pimpinan dengan lancar	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

						Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Agenda Kegiatan Pimpinan dengan lancar	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dengan Baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah			4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	terlaksananya kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
						4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitas Keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah		4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase terwujudnya Fasilitasi Kerja sama Daerah		4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
						4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

					4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tingkat Inflasi ((%))	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

		Pembangunan			PEMBANGUNAN		
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
					4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila Dan Lain-Lain PAD yang Sah			Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah (%)			
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah (%)			
		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kab. Takalar			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase rata-rata Capaian Output sub-kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Nilai Aset Pemerintah Bertambah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

					Bangunan Lainnya	
				persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif

Program merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Data capaian awal tahun perencanaan untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan. Dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar hanya 3 (tiga) program yang ditetapkan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan kegiatan prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2029. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian program dan tujuan Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Periode Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah merumuskan 21 (Dua puluh satu) kegiatan diantaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
12. Penataan Organisasi
13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14. Administrasi Tata Pemerintahan
15. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
16. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
17. Fasilitasi Kerjasama Daerah
18. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
19. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
20. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
21. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Subkegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan merupakan langkah tambahan yang diambil untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Pemilihan subkegiatan dilakukan demi untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara/intermediate outcome) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari

suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 – 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											ERANGKAT DAERAH	OKASI	ETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TA	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	TAR	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					31.593.289.685,00		3.448.175.485,00		3.826.993.401,00		34.222.080.680,00		34.623.681.781,00			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.759.289.685,00		28.330.364.649,00		28.651.220.706,00		28.985.856.797,00		29.326.010.048,00			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE SAKIP (%)	10,40	10,40	10,50	65.000.000,00	10,55	72.000.000,00	10,60	70.000.000,00	10,65	70.000.000,00	10,70	70.000.000,00	.01.0.00.00.37.0000 - Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				65.000.000,00		72.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00				
Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan	4	2	2	65.000.000,00	2	72.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Tata Laksana (Laporan)															
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)					1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)					7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)					2		2		2		2				
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					12.067.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				12.067.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00			
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					22.733.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				22.733.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00			
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					15.298.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	2	15.298.000,00	2	16.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					14.902.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	14.902.000,00	1	16.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
Terlaksananya Agenda Kegiatan Pimpinan dengan lancar	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan	80	85	90	4.827.087.000,00	90	5.440.700.000,00	95	5.440.700.000,00	95	5.443.700.000,00	100	5.440.700.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Tamu Tepat Waktu (%)														
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.000.700.000,00		1.120.700.000,00		1.120.700.000,00		1.123.700.000,00		1.120.700.000,00		
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	2	1.000.700.000,00	2	1.120.700.000,00	2	1.120.700.000,00	2	1.123.700.000,00	2	1.120.700.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	-	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	2		2		2		2		2			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	2	2		2		2		2		2				
4.01.01.2.11.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			KAB. TAKALAR
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00			
4.01.01.2.11.0002	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				150.700.000,00		150.700.000,00		150.700.000,00		153.700.000,00		150.700.000,00			KAB. TAKALAR
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	1	2	2	150.700.000,00	2	150.700.000,00	2	150.700.000,00	2	153.700.000,00	2	150.700.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)																
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00				KAB. TAKALAR, Mappakasingu
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	-	2	2	0,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00				
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00				KAB. TAKALAR
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.761.387.000,00		4.250.000.000,00		4.250.000.000,00		4.250.000.000,00		4.250.000.000,00			
Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1	3.761.387.000,00	1	4.250.000.000,00	1	4.250.000.000,00	1	4.250.000.000,00	1	4.250.000.000,00			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	-	1	1		1		1		1		1				
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		KAB. TAKA LAR	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	-	1	1	1.200.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00			
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					561.387.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		KAB. TAKA LAR	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1	561.387.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00			
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan dengan Baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	11	11	12	65.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan (Laporan)	10	10	12		12		12		12		12				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	10	10	12		12		12		12		12				
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	11	11	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00			
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			appasungu
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	0	2	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00			
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	10	10	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00			
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	21.867.202.685,00	100	22.817.664.649,00	100	23.140.520.706,00	100	23.472.156.797,00	100	23.815.310.048,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					127.000.000,00		172.000.000,00		172.856.057,00		177.000.000,00		173.645.399,00			
Persentase Rata- Rata Capaian Output Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4	127.000.000,00	4	172.000.000,00	4	172.856.057,00	4	177.000.000,00	4	173.645.399,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	2		2		2		2		2				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)														
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	43	50	50		50		50		50					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1					

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					10.000.000,00		15.000.000,00		15.856.057,00		17.500.000,00		16.645.399,00			KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.856.057,00	2	17.500.000,00	2	16.645.399,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	17.500.000,00	2	15.000.000,00		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00			
4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					17.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		KAB. TAKALAR	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	43	50	50	17.000.000,00	50	22.000.000,00	50	22.000.000,00	50	22.000.000,00	50	22.000.000,00		
4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4	4	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.810.891.413,00		13.354.857.722,00		13.657.857.722,00		13.965.349.870,00		14.271.857.722,00		
Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	1	1	12.810.891.413,00	1	13.354.857.722,00	1	13.657.857.722,00	1	13.965.349.870,00	1	14.271.857.722,00		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Tahun SKPD (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		1 2		1 2		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	800	1.000	1.000		12		1 . 0 0 0		1. 0 0 0		1.000			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	800	1.000	1.000	60.000.000,00	12	60.000.000,00	1.000	60.000.000,00	1.000	60.000.000,00	1.000	60.000.000,00			
4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00			Mappakasinggu
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12	46.000.000,00	12	46.000.000,00	12	46.000.000,00	12	46.000.000,00	12	46.000.000,00			
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. TAKALAR
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	6	10.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	4	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00							
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.820.120,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00							
Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	12	50.820.120,00	12	80.000.000,00	1 2	80.000.000,00	1 2	80.000.000,00	12	0 80.000.000,0							
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		4										4	4	4	4			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2										2	2	2	2	2		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	12	12	12										12	1 2	1 2	12			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	SKPD (Laporan)															
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					15.820.120,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. TAKA LAR
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	12	15.820.120,00	12	20.000.000,00	1 2	20.000.000,00	1 2	20.000.000,00	12	20.000.000,00			
4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. TAKA LAR
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00	1 2	20.000.000,00	1 2	20.000.000,00	12	20.000.000,00			
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. TAKA LAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					15.000.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	1/2	15.000.000,00	1/2	15.000.000,00	12	15.000.000,00			
4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					15.000.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan	4	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	1/2	15.000.000,00	1/2	15.000.000,00	12	15.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah (Dokumen)																
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.980.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00				
Persentase rata- rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4	4	4	99.980. 000,00	4	120.000.000, 00	4	120.000.000, 00	4	120.000.000 0,00	4	120.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	4		4		4		4		4		4			
4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					5.957.600,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKA LAR
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4	4	4	5.957.600,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					43.972.400,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	4	43.972.400,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.050.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	4	50.050.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.169.112.860,00		1.440.000.000,00		1.460.000.000,00		1.480.000.000,00		1.520.000.000,00			
Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	15	15	1.169.112.860,00	15	1.440.000.000,00	15	1.460.000.000,00	15	1.480.000.000,00	15	1.520.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12	12	12		12		12		12		12				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	dan Konsultasi SKPD (Laporan)															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		1 2		1 2		12				
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.005.490,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10	15	15	50.005.490,00	15	60.000.000,00	1 5	60.000.000,00	1 5	60.000.000,00	15	80.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Kantor yang Disediakan (Paket)																
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. TAKALAR
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00				
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					101.123.100,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00				KAB. TAKALAR
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	101.123.100,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00				
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					37.984.270,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00				KAB. TAKALAR
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	37.984.270,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00				
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					880.000.000,00		900.000.000,00		920.000.000,00		940.000.000,00		960.000.000,00				KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	880.000.000,00	12	900.000.000,00	1 2	920.000.000,00	1 2	940.000.000,00	12	960.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB. TAKALAR, Mappakasungu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	100.000.000,00	12	300.000.000,00	1 2	300.000.000,00	1 2	300.000.000,00	12	300.000.000,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					223.842.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Nilai Aset Pemerintah Bertambah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	5	223.842.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	4		4		4		4					

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	4		4		4		4		4				
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00			
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.039.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	4	24.039.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					199.803.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			KAB. TAKALAR
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3	4	4	199.803.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Lainnya yang Disediakan (Unit)															
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.210.451.092,00		2.270.000.000,00		2.270.000.000,00		2.270.000.000,00		2.270.000.000,00			
persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.210.451.092,00	12	2.270.000.000,00	12	2.270.000.000,00	12	2.270.000.000,00	12	2.270.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					109.003.820,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			KAB. TAKALAR	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	109.003.820,00	12	120.000.000,00	1 2	120.000.000,00	1 2	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					185.998.272,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	KAB. TAKALAR	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	185.998.272,00	12	200.000.000,00	1 2	200.000.000,00	1 2	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					231.149.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	KAB. TAKALAR, Mappakasingu	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	231.149.000,00	12	250.000.000,00	1 2	250.000.000,00	1 2	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa					1.684.300.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	KAB. TAKALAR	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Pelayanan Umum Kantor																
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	1.684.300.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00			
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.160.105.200,00		5.064.806.927,00		5.064.806.927,00		5.064.806.927,00		5.064.806.927,00			
Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15	5.160.105.200,00	15	5.064.806.927,00	15	5.064.806.927,00	15	5.064.806.927,00	15	5.064.806.927,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	10	92	92		92		92		92		92				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70	70	70		70		70		70		70				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4.568.308.200,0 0		4.473.009.927,00		4.473.009.927,00		4.473.009.927,00		4.473.009.927,00			KAB. TAKA LAR	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70	70	70	4.568.308.200,0 0	70	4.473.009.927,00	70	4.473.009.927,00	70	4.473.009.927,00	70	4.473.009.927,00				
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.020.000,00		100.020.000,00		100.020.000,00		100.020.000,00		100.020.000,00			KAB. TAKA LAR	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15	100.020.000,00	15	100.020.000,00	15	100.020.000,00	15	100.020.000,00	15	100.020.000,00				
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					491.777.000,00		491.777.000,00		491.777.000,00		491.777.000,00		491.777.000,00			KAB. TAKA LAR	
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di	10	92	92	491.777.000,00	92	491.777.000,00	92	491.777.000,00	92	491.777.000,00	92	491.777.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	rehabilitasi (Unit)															
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.639.000.000,0 0		4.911.362.116,00		4.966.985.836,00		5.024.998.468,00		5.083.967.557,00			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten yang Dilaksanakan Berdasarkan Perencanaan Daerah (%)	90	100	100	4.459.000.000,0 0	10 0	4.696.362.116,00	1 0 0	4.751.985.836,00	1 0 0	4.764.998.468,00	100	4.793.967.557,00	4.01.0.00.0 .00.37.00 00 - Sekretariat Daerah		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					4.459.000.000,0 0		4.696.362.116,00		4.751.985.836,00		4.764.998.468,00		4.793.967.557,00			
Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesra Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12	12	12	4.438.945.000,0 0	12	4.666.362.116,00	1 2	4.721.985.836,00	1 2	4.714.998.468,00	12	4.743.967.557,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

<p>Jumlah Fasilitas Keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)</p>	3	12	12	10.027.500,00	12	15.000.000,00	1 2	15.000.000,00	1 2	25.000.000,00	12	25.000.000,00			
<p>Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Pemuda</p>	3	28	28	10.027.500,00	28	15.000.000,00	2 8	15.000.000,00	2 8	25.000.000,00	28	25.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)															
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					4.438.945.000,00		4.666.362.116,00		4.721.985.836,00		4.714.998.468,00		4.743.967.557,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12	12	12	4.438.945.000,00	12	4.666.362.116,00	12	4.721.985.836,00	12	4.714.998.468,00	12	4.743.967.557,00			
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					10.027.500,00		15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	3	12	12	10.027.500,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00			

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)																
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					10.027.500,00		15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	3	28	28	10.027.500,00	28	15.000.000,00	28	15.000.000,00	28	25.000.000,00	28	25.000.000,00				
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Nilai LPPD Kabupaten (Nilai)	2,16	2,16	2,2	65.000.000,00	2,4	80.000.000,00	2,5	80.000.000,00	2,6	125.000.000,00	2,7	145.000.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pencapaian Penerapan SPM di Kabupaten (%)	82,39	100	100		100	100	100	100	100				
	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	90	100	100		100	100	100	100	100				
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan					54.248.400,00		65.000.000,00		65.000.000,00		95.000.000,00		115.000.000,00	
terlaksananya kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	-	2	2	54.248.400,00		65.000.000,00		65.000.000,00		95.000.000,00		115.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)													

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)																
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)																
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan					28.659.200,00		30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4	4	4	28.659.200,00	4	30.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00				
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					7.647.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2	2	7.647.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	17.500.000,00	2	20.000.000,00				
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi					7.942.200,00		10.000.000,00		10.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	2	7.942.200,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	17.500.000,00	2	20.000.000,00				
4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	0	2	2	5.000.000,00	2	7.500.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00				
4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	-	2	2	5.000.000,00	2	7.500.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00			
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah					10.751.600,00		15.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Persentase terwujudnya Fasilitasi Kerja sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	2	2	2	10.751.600,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	30.000,00	2	30.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)															
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					8.311.100,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2	5	5	8.311.100,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00			
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					2.440.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	2	2	2	2.440.500,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Disahkan Pemerintah Daerah (%)	90	100	100	115.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	145.000.000,00			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					115.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00			
Persentase Produk Hukum yang disahkan Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	400	650	650	115.000,00	650	135.000.000,00	650	135.000.000,00	650	135.000.000,00	650	145.000.000,00			
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	400	600	600		600		600		600		600				
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)															
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		KAB. TAKALAR	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	400	600	600	50.000.000,00	600	60.000.000,00	600	60.000.000,00	600	60.000.000,00	600	70.000.000,00			
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum					40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		KAB. TAKALAR	

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	3	3	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00			
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	400	650	650	25.000.000,00	650	30.000.000,00	650	30.000.000,00	650	30.000.000,00	650	30.000.000,00			
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					195.000.000,00		206.448.720,00		208.786.859,00		211.225.415,00		213.704.176,00			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	80	85	85	65.000.000,00	90	52.500.000,00	90	52.500.000,00	90	52.500.000,00	95	52.500.000,00	4.01.0.00.0.0.37.00.00 - Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					65.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00			
Persentase rata-rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	3	4	4	65.000.000,00	4	52.500.000,00	4	52.500.000,00	4	52.500,00	4	52.500.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program	2	1	1		1		1		1						

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Pembangunan Daerah (Dokumen)																
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					21.688.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	1	1	21.688.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					21.859.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	3	4	4	21.859.000,00	4	17.500.000,00	4	17.500.000,00	4	17.500.000,00	4	17.500.000,00				
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					21.453.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00				KAB. TAKALAR

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	1	21.453.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	75	75	80	65.000.000,00	80	82.500.000,00	80	84.838.139,00	85	87.000.000,00	90	90.000.000,00			
	Tingkat Inflasi ((%))	25	25	25		25		25		25		25		25		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					36.904.900,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	2	36.904.900,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	2	2	2		2		2		2		2		2		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Mikro Kecil (Dokumen)																
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					15.172.900,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	2	15.172.900,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00				
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					10.948.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2	2	10.948.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00				
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					10.784.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2	2	2	10.784.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					28.095.100,00		37.500.000,00		39.838.139,00		42.000.000,00		45.000.000,00			
Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	12	12	12	28.095.100,00	12	37.500.000,00	12	39.838.139,00	12	42.000.000,00	12	45.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	2	2	2		2		2		2							
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					6.497.100,00		10.000.000,00		12.338.139,00		14.500.000,00		15.000.000,00				KAB. TAKALAR
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	12	12	12	6.497.100,00	12	10.000.000,00	12	12.338.139,00	12	14.500.000,00	12	15.000.000,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					10.798.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	12	12	12	10.798.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					10.800.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		KAB. TAKALAR
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	12	12	12	10.800.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	15.000.000,00		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

	Pertanahan (Dokumen)																
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif (%)	90	90	90	65.000.000,00	95	71.448.720,00	95	71.448.720,00	100	71.725.415,00	100	71.204.176,00				
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					65.000.000,00		71.448.720,00		71.448.720,00		71.725.415,00		71.204.176,00				
Level Maturitas UKPBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4	12	12	65.000.000,00	12	71.448.720,00	12	71.448.720,00	12	71.725.415,00	12	71.204.176,00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4	16	16		16		16		16							
Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa					0		0		0		0		0				
Level Maturitas UKPBJ	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		2	2	65.000.000,00	2	71.448.720,00	2	71.448.720,00	2	71.725.415,00	2	71.204.176,00				

**Rencana Strategis (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029**

Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa					0		0		0		0		0			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					14.193.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. TAKALAR
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4	12	12	14.193.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00			
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					41.081.000,00		43.948.720,00		43.948.720,00		44.225.415,00		43.704.176,00			KAB. TAKALAR
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4	12	12	41.081.000,00	12	43.948.720,00	12	43.948.720,00	12	44.225.415,00	12	43.704.176,00			
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					9.726.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			KAB. TAKALAR
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4	16	16	9.726.000,00	16	12.500.000,00	16	12.500.000,00	16	12.500.000,00	16	12.500.000,00			

4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional

Program prioritas pembangunan daerah adalah rangkaian kegiatan yang disusun berdasarkan isu strategis dan kebutuhan masyarakat suatu daerah untuk mencapai target pembangunan jangka menengah (misalnya 5 tahunan) yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Prioritas ini berfokus pada program unggulan yang paling relevan (berhubungan dengan leading indicators) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan minimal, serta mengoptimalkan potensi daerah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat Daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak dan fasilitator dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah				
1,	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
2,	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKU juga dapat diartikan sebagai Key Performance Indicator (KPI). Tujuan dari penetapan IKU adalah untuk mengetahui kinerja instansi, meningkatkan kinerja instansi, untuk mencapai tujuan, sasaran, rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya serta memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Penetapan target IKU ditentukan dengan melihat sejauh mana realisasi yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dan memperkirakan capaian yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah atau dapat juga digambarkan bahwa indikator kinerja digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi agar dapat secara efektif mencapai sasaran/tujuan yang diinginkan. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Indikator kinerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar yang ditargetkan untuk lima tahun yang akan datang. Target ini merupakan komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, yaitu pada Misi ke-2 yakni Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1,	4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah	Z								
2,	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Nilai	69,23	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
3,	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4,	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah	%	-28,77	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
5,	Nilai Sakip Daerah	Nilai	64,05	65,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
6,	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,87	3,01	3,25	3,51	3,60	3,80	4,00	
7,	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	56,00	57,00	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	
8,	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	%	50,10	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
9,	Tingkat Inflasi	(%)	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,15	
10,	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,06	2,97	3,02	3,46	3,37	3,77	3,92	
11,	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Sekretariat Daerah	Nilai	71,00	72,00	73,00	75,00	78,00	80,00	81,00	
12,	Tingkat Literasi Digital ASN pada Sekretariat Daerah	%	85,00	91,00	92,00	94,00	95,00	97,00	100	

4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program, terutama dalam konteks pemerintahan. IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK tidak hanya sekedar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 digambarkan pada tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1,	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2,	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		%	2	2	2	2	2	2	2	
3,	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		%	0	0	0	0	0	0	0	
4,	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		%	43	43	47	52	58	65	67	

4.6 Target Capaian TPB/SDGs Sekretariat Daerah

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Takalar telah berkontribusi menyukseskan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kontribusi tersebut khususnya pada tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan indikator Tingkat Inklusi Keuangan, Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa, Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa. Dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.6 Target Capaian SDGs Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2025-2029**

NO	KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PENCAPAIAN						INSTANSI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 8 :MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
8.10. MEMPERKUAT KAPASITAS LEMBAGA KEUANGAN DOMESTIK UNTUK MENDORONG DAN MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PERBANKAN, ASURANSI DAN JASA KEUANGAN BAGI SEMUA												
1	8.10.1.(a)	Tingkat Inklusi Keuangan	OJK	Persentase	150	75	79	81	83	85	9	SEKRETARIAT DAERAH
2	8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	OJK	Persentase	20	20	22	24	26	28	0	SEKRETARIAT DAERAH
3	8.10.2 (a)	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa	BI	Rekening	150	150	175	180	185	190	95	SEKRETARIAT DAERAH
4	8.10.2 (b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	BI	Rekening	200	200	250	300	350	400	50	SEKRETARIAT DAERAH
5	8.10.1	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 Penduduk Dewasa	OJK	Rekening	102	102	105	110	115	120	25	SEKRETARIAT DAERAH
Tujuan 16 :MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusi di Semua Tingkatan												

16.6 MENGEMBANKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT

5	16.6.2.(a)	Persentase Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan Pelayanan Publik kategori baik	Ombudsm an RI	Predikat	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	SEKR ETAR IAT DAER AH
---	------------	--	---------------	----------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------------------

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Takalar. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai panduan bersama untuk menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan lebih baik. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan kerja sama dan semangat tinggi dari seluruh jajaran, serta dukungan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Takalar yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Sebagai upaya implementasi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, arah kebijakan serta melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris Daerah;
2. Seluruh Bagian/Kepala Sub Bagian/Seksi di lingkungan Sekretariat Daerah agar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra Sekretariat Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Sekretariat Daerah, hingga penyusunan rencana kerja anggaran Sekretariat Daerah.

4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil implementasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Hasil tersebut dapat dilihat dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Pertriwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dengan demikian, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar tahun 2025-2029.

Takalar, 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



DR. MUHAMMAD MASBILIS, STP., M.AP., M.I.Kom

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19810112 200012 1 001



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 161 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029**

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022, Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - c. menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda;
 - e. kepala perangkat daerah menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.



Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 28 Mei 2025

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Tembusan.

1. Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar di Takalar;
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris Tim	Asisten
3.	Kelompok Kerja	1. Para Kepala Bagian 2. Kasubag Perencanaan 3. Pengolah Data 4. Staf
4.	Tim Pendamping	Tim Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar



BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE